



## Pemprov Siapkan 14.000 Pekerja PPSU

### Balai Kota, Warta Kota

Pemerintah Provinsi DKI akan menyiapkan 14.000 pekerja pelaksana prasarana sarana umum (PPSU) di seluruh kelurahan di Jakarta. Mereka bertugas membantu kebersihan, kenyamanan, dan keamanan wilayah.

Bambang Sugiyono, Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, mengatakan, saat ini dari 14.000 PPSU yang direncanakan, sudah kurang lebih 50 persen bekerja di kelurahan. Jumlah kelurahan di Jakarta sendiri sebanyak 265 kelurahan.

"Nantinya masing-masing kelurahan akan diturunkan sebanyak 40 hingga 70 petugas. Dilihat dari segi luas wilayah tersebut," kata Bambang, Minggu (5/7).

Para petugas itu, kata Bambang, akan direkrut oleh masing-masing kelurahan. Sementara untuk penugasan diberikan oleh lurah maupun sekretaris kelurahan.

"Para PPSU ini merupakan petugas tanpa memiliki keahlian khusus. Jadi ditugaskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian. Seperti membersihkan sampah, termasuk di selokan atau kali. Lalu memperbaiki sementara jalan yang berlubang, mengevakuasi pohon tumbang, dan lainnya," kata Bambang.

Selain itu, kata Bambang, mereka juga berperan sebagai mata dan telinga lurah.



abn

Misalnya, ada petugas tahu ada warga yang tidak mampu atau tidak mampu sekolah, petugas bisa langsung informasikan ke lurah sehingga bisa cepat ditindaklanjuti.

### Gaji UMP

Bambang mengatakan, mereka bekerja sesuai dengan zonasi wilayah. Dimana

**Kami beri mereka gaji sebesar UMP. Per bulan Rp 2,7 juta dengan kontrak per orang. Dalam satu hari ada dua shift.**

### Bambang Sugiyono

penempatannya tidak akan tumpang tindih dengan in-

stansi lainnya. Seperti dengan petugas Dinas Kebersihan.

"Kami beri mereka gaji sebesar UMP (upah minimum provinsi). Per bulan Rp 2,7 juta dengan kontrak per orang. Kami beri baju kerja wearpack, topi, dan sepatu. Dalam satu hari ada dua shift," kata Bambang.

Syarat untuk menjadi petugas PPSU cukup dengan KTP DKI, pendidikan minimal SD, dan berusia tidak lebih dari 58 tahun.

"Dampaknya kini sudah terlihat. Lingkungan sudah lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Karena setiap harinya sebanyak 40 sampai 70 petugas diturunkan di masing-masing kelurahan," kata Bambang. (suf)

## Diduga Kejar Penyerapan Anggaran

**M**OHAMAD Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI, mengatakan, mengapresiasi niat Gubernur DKI Jakarta membereskan dan membersihkan Jakarta.

Namun, ia menyayangkan kebijakan yang melibatkan ribuan pekerja dari masyarakat sipil dengan gaji UMP itu tidak terbuka.

"Kalau saya melihatnya itu sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran. Karena kami ketahui, sampai saat ini penyerapan masih di bawah 20 persen," kata politisi Gerindra tersebut kepada *Warta Kota*.

Namun, tak hanya itu, Taufik menduga, perekrutan itu merupakan sebagai upaya

penggalangan massa. Ribuan pekerja itu akan digunakan sebagai salah satu penghasil suara dukungan, saat Gubernur DKI Jakarta maju lagi sebagai gubernur dalam Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017.

Taufik mengatakan, seharusnya Pemprov DKI menyalurkan warga yang ingin bekerja ke perusahaan-perusahaan. Dibandingkan menjadi PPSU yang aturannya tidak jelas tersebut.

"Sebenarnya niat pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) itu bagus. Tetapi beliau selalu melanggar aturan yang ada. Jadi saya rasa keberadaan mereka tidak maksimal. Lihat saja saat ini masih banyak sampah dan jalan rusak," kata Taufik. (suf)